BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan suatu hubungan yang melintasi batas negara, dengan adanya hubungan internasional sekat-sekat penghalang yang ada dapat dihilangkan sehingga aktor-aktor hubungan internasional dapat berinteraksi dengan bebas. Yang menjadi titik awal perkembangan dalam bidang hubungan internasional adalah sejak Perang Dunia I, yakni pada saat adanya upaya-upaya untuk mengorganisasikan dunia ke dalam suatu wadah yang berskala internasional yakni dengan didirikannya Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Dengan didirikannya LBB tersebut sebagai suatu organisasi internasional, maka sekaligus membuka babak baru tentang kajian bidang hukum internasional, politik internasional, ekonomi internasional, dan organisasi internasional (Sitepu, 2011: 9).

Trauma Perang Dunia I yang sarat unsur legalistik, dijadikan sebagai titik perhatian dari kaum idealis. Mereka beranggapan bahwa perang tersebut dianggap sebagai sutu kecelakaan. Dan setelah Perang Dunia II, lahir pula generasi baru dengan pemikiran baru yang berbeda dalam kerangka studi hubungan internasional, yaitu kaum realis. Mereka memproklamirkan sutu gagasan bahwa politik berdasarkan pada *power* agar terciptanya keamanan global (Sitepu, 2011: 11).

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003 : 2).

Dari sejarah pekembangannya studi hubungan internasional bersifat interdisipliner, yaitu dimana hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek ilmu-ilmu sosial lain yang menjadi pembentuknya dengan sifat keilmuannya saling timbal balik. Dari sejarah perkembangan hubungan internasional, secara umum dapat dinyatakan bahwa ilmu hubungan internasional lahir dengan tujuan untuk mencegah perang dan membangun perdamaian. Sehingga secara serius terdapat upaya-upaya untuk memunculkan ilmu yang benar-benar mandiri (Darmayadi, 2015 : 12).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional, perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dilakukan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut. Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena berbagai aktivitas internasional yang meliputi berbagai

bidang, seperti ideologi, politik sosial, ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan dan pertahanan. Isu utama dari kerjasama internasional berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh oleh kedua pihak atau lebih melalui kerjasama tersebut, dan dapt mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan unilateral dan kompetitif. Karena dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita & Yani, 2005 : 33-34).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai bangsa dan negara yang tidak dapat dipenuhi dari dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Hal yang utama dari sebuah kerjasama internasional ialah berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut sehingga dapat mendukung konsepsi dari unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, kerjasama internasional menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh negara maupun aktor-aktor internasional lainnya. Adanya *complex interdependence* atau ketergantungan di antara aktor-aktor internasional menyebabkan perlunya melakukan suatu kerjasama antar aktor untuk memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing.

Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Berikut adalah bentuk-bentuk dari kerjasama internasional berdasarkan pada jumlah yang mengikuti sebuah kerjasama:

a. Kerjasama Bilateral

   Kerjasama dilakukan antara dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan dan kebudayaan. Kerjasama bilateral cenderung lebih mengutamakan pendekatan secara kekerabatan, seperti memberikan bantuan berupa dana untuk fasilitas kegiatan ataupun berupa pinjaman.

b. Kerjasama Regional

   Dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan (ASEAN dan Liga Arab).

c. Kerjasama Multilateral

   Dilakukan oleh beberapa negara dalam bidang tertentu, diantaranya bidang ekonomi *Asia Pacific Economi Cooperation* (APEC), sosial dalam *International Labour Organization* (ILO), pertahanan dan keamanan dalam *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) (Djelantik, 2008 : 85-87)

2.1.2.1 Kerjasama Bilateral

Bentuk kerjasama internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran duta besar, kunjungan kenegaraan dan penandatanganan atau

perjanjian. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002 : 127).

Dalam pergaulan internasional saat ini, kerjasama bilateral banyak diisi dengan kerjasama dalam bidang ekonomi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa aspek yang paling penting dalam bernegara ialah kemampuan ekonominya dalam mensejahterakan seluruh rakyat di negara tersebut. Oleh sebab itu kerjasama yang dilakukan oleh dua negara dalam bidang ekonomi juga tidak luput dari motif politik agar kebutuhan nasional di negaranya dapat terpenuhi.

2.1.2.2 Kerjasama Ekonomi Internasional

Istilah kerjasama ekonomi internasional tidak sama dengan perdagangan internasional. Kerja sama ekonomi internasional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Dengan demikian kerja sama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu, dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan.

Berdasarkan pengertian kerjasama, maka setiap negara yang mengadakan kerjasama dengan negara lain pasti mempunyai tujuan. Berikut ini tujuan kerjasama antarnegara.

a. Mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang mengadakan kerja sama.
b. Meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerja sama di berbagai bidang.
c. Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia.

d. Memperluas hubungan dan mempererat persahabatan.

Meningkatkan devisa Negara (Priangani, 2014: 152).

Adapun motif dari dilakukannya sebuah kerjasama ialah salah diantaranya karena adanya perbedaan sumber daya alam, adanya perbedaan iklim dan kesuburan tanah, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir ialah adanya perbedaan ideologi (Priangani, 2014: 153).

2.1.3 Diplomasi

Hubungan internasional lahir dan berkembang karena adanya dampak dari Perang Dunia I, dan akibat dari peristiwa tersebut ialah lahirnya teori-teori serta instrumen-instrumen untuk mencari dan mencapai perdamaian. Salah satu yang dapat dilakukan dalam mencapai perdamaian adalah diplomasi. Diplomasi dalam dunia politik mengacu pada suatu proses komunikasi antara aktor-aktor internasional melalui upaya negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Proses ini telah diperbaharui, diinstitusionalisasikan dan diprofesionalkan di beberapa negara-negara di dunia. Sedangkan pengertian diplomasi dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri ialah fungsi diplomat sebagai suatu instrumen kebijakan dalam sebuah asosiasi dengan instrumen lain seperti ekonomi atau kekuatan militer untuk memungkinkan aktor-aktor internasional mencapai tujuan politiknya (Darmayadi, 2015: 55-56).

Diplomasi merupakan praktik dalam komunikasi antarnegara dan merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam buku

Shoelhi yang berjudul Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional, dipaparkan mengenai macam-macam diplomasi (Shoelhi, 2011 : 81-88), diantaranya:

1. Diplomasi Preventif

   Merupakan diplomasi yang dilakukan ketika masyarakat menghadapi situasi genting yang akan memunculkan konflik besar atau perang.

2. Diplomasi Demokratis

   Merupakan diplomasi yang harus dijalankan secara terus terang dan terbuka serta mendapatkan pengawasan penuh dari public

3. Diplomasi Kebudayaan

   Merupakan diplomasi yang menggunakan kebudayaan sebagai sarana untuk mempererat hubungan internasional. Untuk alasan mempererat hubungan tersebutlah sejak dahulu para diplomat memperkenalkan kebudayaan pada masyarakat internasional dengan tujuan untuk mempengaruhi atau memperbaiki sikap dan pandangan mereka terhadap negaranya. Menurut Kartini Sbekti (dalam Shoelhi, 2011 : 8). Kebudayaan merupakan sarana penunjang yang ampuh bagi diplomasi dan dapat menumbuhkan saling pengertian, bahkan dapat menjembatani pandangan-pandangan yang berbeda. Diplomasi kebudayaan bisa diimplementasikan dalam bentuk berbagai festival internasional mengenai kebudayaan, seperti misalnya festival musik, festival tari dari berbagai daerah; pameran benda-benda tradisional bersejarah, barang-barang antik serta perhiasan, pagelaran seni rupa, pertunjukan teater dan film; serta bazar makanan tradisional. Acara

festival-festival seperti itu selalu dapat menarik minat sebagian besar khalayak massa di negara akreditasi tempat diplomat bertugas. Melalui festival itu, terjadilah interaksi aktif antarmanusia dan antarbangsa, dan interaksi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menunjang berbagai kegiatan diplomasi.

4. Diplomasi Ekonomi

   Merupakan bentuk diplomasi untuk menanamkan pengaruh melalui sarana bantuan ekonomi sebagai sarana utamanya. Diplomasi ini juga dikenal dengan sebutan shop keeper diplomasi. Globalisasi telah mendorong praktik diplomasi ekonomi sehingga saat ini hampir seluruh negara-negara di dunia menggunakan diplomasi ekonomi untuk memperoleh kepentingan nasionalnya.

Dalam perspektif ekonomi, tujuan diplomasi diantaranya adalah untuk menaikan bargaining poweratau daya tawar, juga untuk melindungi kepentingan negara dalam memajukan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Sedangkan dalam perspektif kultural, tujuan diplomasi diarahkan untuk memamerkan keagungan kebudayaan suatu negara dan apabila mungkin diplomasi dapat dijadikan cara untuk mempengaruhi opini publik di negara yang didatangi. JW Fullbright pernah menyatakan bahwa bentuk dunia satu generasi sesudah ini akan lebih dipengaruhi oleh seberapa baik kita mengkomunikasikan nilai-nilai budaya massa atau budaya pop yang mengagungkan konsumerisme (Shoelhi, 2011: 90)

2.1.3.1 Paradiplomasi

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas '*sub-state'*, atau pemerintah regional maupun pemerintah daerah, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik. Istilah '*paradiplomacy*' pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah *'parallel diplomacy'* menjadi '*paradiplomacy'*, yang mengacu pada makna '*the foreign policy of non-central governments'*, menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek (New York, tahun 1990) untuk konsep ini adalah '*micro-diplomacy'* (Mukti, 2013: 2).

Dalam konteks ini, aktor sub-Negara diperankan oleh pemerintahan regional atau lokal yang secara tradisional bertindak sebagai aktor dalam negeri. Namun, pada era transnasional, pemerintah regional juga melakukan interaksi yang melintasi batas-batas negera mereka, dan dalam taraf tertentu, mereka juga menyusun kebijakan kerja sama luar negerinya, yang dalam banyak kasus, tidak selalu berkonsultasi secara baik dengan pemerintah pusat. Fenomena pemerintah regional membangun hubungan internasional ini sangat tampak di Negara-negara industri maju di Barat (Mukti, 2013: 38).

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan daerah otonom untuk melakukan kerjasama luar negeri ini terdapat dalam pasal 42 ayat (1), bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap

rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ditegaskan pula dalam penjelasan pasalnya bahwa selain *sister city/province*, Pemerintah daerah juga dapat membuat perjanjian kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman atau hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, SETNEG, Tahun 2004).

Meskipun lokus utama pembuatan kebijakan berada pada lembaga formal seperti pemerintah daerah dan DPRD, namun partisipasi masyarakat juga tetap diperlukan agar kebijakan tersebut memiliki legitimasi, tidak sekedar legalitas. Melalui partisipasi, masyarakat dapat mengontrol proses dan substansi kebijakan sehingga berpihak pada kepentingan publik. Sehingga keputusan yang diambil oleh institusi pemerintahan di daerah, baik eksekutif maupun legislatif dapat merefleksikan aspirasi masyarakat (Mariana dan Paskarina, 2008: 280-281).

Dengan terlibatnya pemerintah lokal dalam melaksanakan hubungan dengan pihak luar negeri, maka itu mengindikasikan bahwa pemikiran paling mendasar tentang kedaulatan Negara telah berubah secara fundamental. Maka pemerintah pusat harus memberikan kebabasan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kepentingannya sendiri (Mukti, 2013: 39).

2.1.3.1.1 *Sister City*

Melalui paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu tingkat Provinsi maupun Kota, terdapat kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu berupa kerjasama dalam membuat sutu kota kembar atau

sister city, dalam tingkat provinsi bernama *sister province*. *Sister City* merupakan suatu konsep kerja sama antara dua kota yang secara geografis dan politik serupa dan bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar-budaya dan individu. Istilah twin town ini, walaupun bukan keharusan, seringkali memiliki demografis dan karakteristik yang serupa. Konsep ini bisa juga digambarkan sebagai sebuah bentuk "sahabat pena", hanya saja disini yang berhubungan adalah kota dengan kota di negara yang berbeda (Sinaga, 2010: 31).

Konsep sister city ini mulai dikembangkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pada tahun 1950an, konsep *sister city* ini dilegalkan dengan adanya dukungan dari Presiden Amerika Serikat, Eisenhower, yang mewujudkannya dengan protokol . Dewasa ini program *sister city* telah meningkatkan solidaritas dan meningkatkan perdamaian dunia melalui pertukaran kebudayaan antar kota dalam negara-negara. Program tersebut meliputi pertukaran pemikiran, pertukaran individu, dan material yang melibatkan berbagai budaya, tingkat pendidikan, olah raga, pegawai pemerintahan, serta teknisi-teknisi dan profesional suatu proyek pengembangan. Kerja sama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini mengingat perannya dalam menentukan ketahanan negara, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerja sama ini diperlukan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerja sama tersebut (Sinaga, 2010: 33).

2.1.4 Ekonomi Internasional

Ekonomi Internasional adalah sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan Ekonomi Internasional (Ekspor-Impor) yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter serta organisasi ekonomi (Swasta maupun Pemerintah) dan kerjasama ekonomi antar negara. Ekonomi Internasional adalah bagian atau cabang dari Ilmu Ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar Negara atau antar bangsa. Sebagai bagian dari ilmu ekonomi maka permasalahan pokok yang dihadapi dalam Ekonomi Internasional sama dengan ilmu ekonomi, yaitu masalah kelangkaan produk, dan masalah pilihan produk, yang diartikan produk adalah barang dan jasa serta ide yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh manusia (Priangani, 2014: 1).

Nopirin mendefinisikan ekonomi internasional seperti ilmu ekonomi biasa yang mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia, hanya saja problematikanya berada dalam lingkup internasional (Priangani, 2014: 2). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam ekonomi internasional mempelajari tentang aktivitas ekspor dan impor antarnegara, dan dalam ekonomi internasional juga membahas salah satu permasalahan yaitu mengenai kelangkaan produk. Dalam hal ini di dalam ekonomi internasional membahas tentang faktor produksi yang dilakukan oleh suatu negara dalma rangka meningkatkan produksi barang di negara tersebut.

Pertumbuhan sendiri produksi pada dasarnya dipengaruhi oleh perkembangan (pertumbuhan) faktor-faktor produksinya (modal, tenaga kerja,

tanah dan teknologi). Analisis terhadap pertumbuhan ekonomi yang menghubungkan pertumbuhan faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR menghubungkan besarnya pembentukan modal tetap domestik bruto dengan pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB). Dan penggunaan faktor produksi secara tunggal juga dengan pertumbuhan ekonomi jelas mengandung kelemahan. Secara umum dapat dikatakan bahwa proses perkembangan ekonomi sebagian besar ditujukan untuk memperlebar (*widening*) dan memperdalam (*deepening*) penggunaan dari modal untuk menaikkan daya guna dari tenaga kerja. Faktor tanah hanya dapat berubah dengan lambat, itu juga bila tidak terjadi keguguran; tenaga kerja dapat bertambah dengan lebih cepat memalui imigrasi dan pertambahan penduduk, tetapi modal merupakan faktor yang relatif dapat ditingkatkan. Dengan melalui pembentukan modal yang relatif lebih banyak dibandingkan daripada tanah dan tenaga kerja akan tercapainya tujuan untuk menaikkan material secara berlimpah-limpah (Priangani, 2014: 167-168).

2.1.4.1 Ekonomi Wilayah dan Perkotaan

Ilmu Ekonomi Wilayah dan Perkotaan merupakan cabang ilmu ekonomi yang relatif baru berkembang. Namun demikian, perkembangan ilmu tersebut dewasa ini ternyata cukup pesat. Di Indonesia, ilmu ini berkembang pesat sejak diberlakukannya otonomi daerah mulai tahun 2001. Di mana pengambilan keputusan padatingkat daerah sudah semakin dimungkinkan dan bahkan merupakan sebuah keharusan agar sesuai dengan kondisi dan permasalahan daerah setempat (Sjafrizal, 2012: 2).

Latar belakang munculnya Ilmu Ekonomi Wilayah dan Perkotaan ini ialah karena adanya kelemahan dari Ilmu Ekonomi tradisional yang pada umumnya mengabaikan dimensi lokasi dan ruang dalam analisisnya. Di samping itu, Ilmu Ekonomi menganggap bahwa struktur ekonomi wilayah dan perkotaan ialah sama dengan struktur ekonomi tradisional yang dalam kenyataannya sukar diterima. Akibatnya analisis Ilmu Ekonomi Tradisional cenderung menjadi kurang realistis, karena bagaimanapun adanya unsurr lokasi dan ruang adalah jelas dan nyata dan memengaruhi kegiatan sosial-ekonomi. Aspek ini terutama sangat memengaruhi analisis ekonomi pada daerah perkotaan, di mana ruang yang tersedia relatif sempit sedangkan kepadatan penduduk sangat tinggi, sehingga pengambilan keputusan tentang penggunaan lahan (*land-use)* harus dilakukan lebih secara teliti (Sjafrizal, 2012: 2).

Salah satu pertanyaan yang dapat dijawab oleh Ilmu Ekonomi Wilayah dan Perkotaan ialah, pada daerah mana kegiatan produksi harus dilakukan? Karena ilmu ini memfokuskan analisisnya pada pengaruh lokasi dan tata ruang dalam pengambilan keputusan bidang ekonomi dan bisnis pada tingkat wilayah dan kota.

Variabel yang dapat mewakili unsur ruang dalam analisis Ekonomi Wilayah dan perkotaan adalah perbedaan struktur dan potensi sosial-ekonomi antarwilayah. Perbedaan karakteristik wilayah ini merupakan hal yang bersifat lumrah dan terjadi di seluruh negara, baik di negara maju maupun negara berkembang. Hal ini karena adanya perbedaan variasi kandungan sumber daya alam, tingkat kesuburan tanah maupun kondisi sosial budaya masyarakat yang cukup besar.

Variabel lain yang juga penting artinya dalam analisis Ekonomi Wilayah dan Perkotaan ialah Interaksi Sosial-Ekonomi Antarwilayah. Interaksi ini dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu: (a) perdagangan antar daerah, (b) perpindahan tenaga kerja atau migrasi, (c) lalu lintas modal dan (d) distribusi inovasi antarwilayah (Sjafrizal, 2012: 6-7)

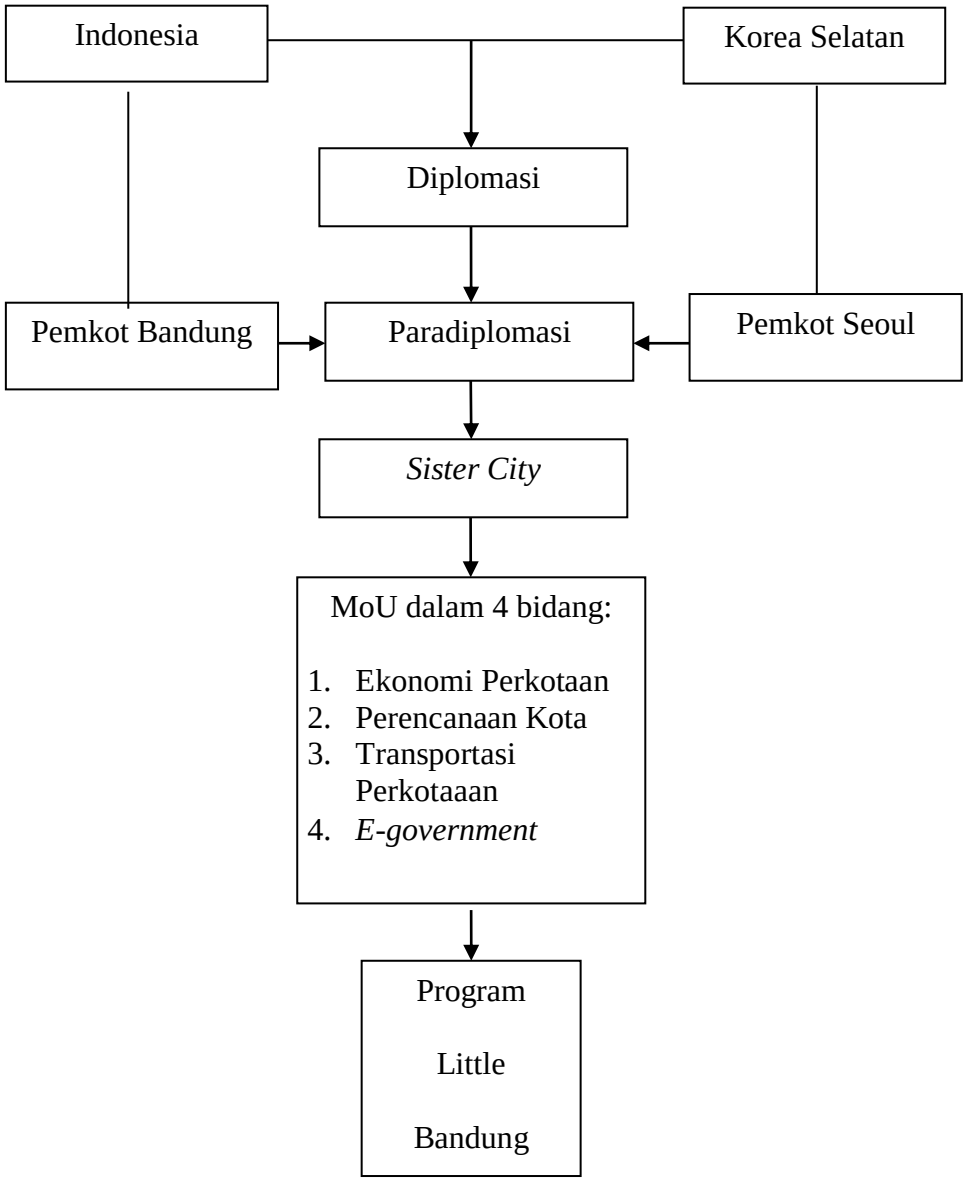
2.2 Kerangka Pemikiran

Kerjasama yang terjalin tersebut merupakan salah satu bentuk interaksi antar aktor dalam menjalin hubungan internasional. Adanya hubungan anata kedua kota merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan. Didasarkan pada kerjasama antara Negara Indonesia dan Korea Selatan, karena pada dasarnya setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan mencapai kepentingan bagi tujuan bersama. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pemerintah Indonesia yang menjalin hubungan kerjasama dengan Korea Selatan sejak tahun 1973. Sampai saat ini Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin kerjasama di berbagai bidang, baik itu ekonomi, politik, sosial, pendidikan, keamanan, budaya, maupun pertahanan.

Hubungan bilateral dan diplomasi yang sudah dibangun sejak dulu antara Indonesia dan Korea Selatan sampai saat ini terbilang cukup baik. Mengingat kedua negara memiliki persamaan latar belakang dalam beberapa bidang, seperti halnya kedua negara sama-sama menjadi bagian penting dalam membangun perekonomian di wilayah masing-masing, Indonesia mempunyai peran penting di Asia Tenggara dalam perekonomiannya sedangkan Korea Selatan memiliki peran di Asia Timur.

Paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terhadap Pemerintah Metropolitan Seoul melalui program *Little Bandung* terjadi setelah adanya kerjasama yang terjalin antara kedua kota. Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Metropolitan Seoul melalui paradiplomasi *sister city*, dalam bidang ekonomi perkotaan melalui program *Little Bandung* ini tentu memiliki kepentingan bagi kedua belah pihak. Bagi pemerintah Kota Bandung tentu saja salah satu kepentingannya ialah untuk memasarkan produk-produk UMKM. Dalam ekonomi internasional, kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Pemereintah Metropolitan Seoul ini masuk kepada perdagangan internasional, karena adanya ekspor yang dilakukan oleh para pelaku UMKM yang tergabung dalam program *Little* Bandung. Selain itu, kepentingan Pemerintah Kota Bandung dalam kerjasama ini ialah untuk juga untuk mengenalkan budaya Indonesia di luar negeri dan juga menjaga hubungan kerjasama dengan Korea Selatan, khususnya dengan Pemerintah Metropolitan Seoul. Sedangkan kepentingan Pemerintah Metropolitan Seoul dalam kerjasama ini ialah untuk menjaga hubungan kerjasama dengan Indonesia.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran